

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan instansi untuk mendukung operasi bisnis instansi itu sendiri. Begitu pula instansi negara Republik Indonesia tentu sangat membutuhkan kinerja teknologi untuk membantu mensukseskan pembangunan negeri. Seiring bertambahnya waktu, perkembangan instansi dalam pembangunan negeri semakin kompleks dan memiliki banyak komponen, baik dari segi proyek, proses bisnis, data-data yang masuk kedalam *database* instansi, hingga jumlah personel yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, tentunya teknologi menjadi satu kesatuan dalam kelangsungan suatu instansi khususnya instansi negara.

Namun, dalam pengoperasian suatu proses bisnis Teknologi Informasi (TI), banyak sekali gangguan yang terjadi. Sehingga membuat terhambat jalannya proses bisnis instansi. Gangguan yang sangat berpengaruh pada kinerja TI seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, padam listrik, dan lain sebagainya. Gangguan yang sangat berpengaruh ini disebut dengan bencana. Maka untuk penanggulangan gangguan-gangguan tersebut, dibuatlah rencana untuk pemulihan bencana disebut *Disaster Recovery Plan (DRP)*.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) Kabupaten Bandung adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan Pemerintahan Jawa Barat. Adapun tugas pokok dari Diskominfo Kabupaten Bandung adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika seperti komunikasi, informatika, persandian dan statistika yang menjadi kewenangan provinsi (Pemerintah Kabupaten Bandung, 2017).

Diskominfo Kabupaten Bandung memiliki layanan yaitu memasok kebutuhan TI kepada 79 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintahan Kabupaten Bandung. Tidak dapat dibayangkan apabila bencana terjadi dan mengganggu layanan Diskominfo Kabupaten Bandung, dapat menyebabkan proses bisnis 79 SKPD tersebut mati. Maka sangat perlu dibuat desain DRP agar Diskominfo memiliki koordinasi yang efektif terkait penanggulangan bencana di instansinya, kontinuitas

pelayanan Diskominfo bisa berlangsung, sehingga proses bisnis 79 SKPD Pemerintahan Kabupaten Bandung bisa terus berjalan.

Agar perancangan DRP terstruktur dalam sisi manajemen untuk kontinuitas bisnis dan memiliki acuan yang jelas, maka perancangan DRP ini dibuat berdasarkan ISO 22301:2012.

I.2 Perumusan Masalah

Berasarkan permasalahan yang sudah dituliskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada Proposal Tugas Akhir ini:

1. Apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan desain DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung?
2. Apa saja prosedur yang dihasilkan dari desain DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana desain DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung yang memiliki keterkaitan dengan *people, process, and technology* dan berdasarkan ISO 22301:2012?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari Tugas Akhir ini adalah menghasilkan *output* desain rancangan DRP yang sesuai dengan instansi yang menjadi studi kasus pada Tugas Akhir ini. Detail pada tujuan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dalam perancangan desain DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung.
2. Mengidentifikasi prosedur apa saja yang dihasilkan dari DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung.
3. Membuat perancangan DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung yang memiliki keterkaitan dengan *people, process, and technology* untuk memenuhi ISO 22301:2012.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah untuk membuat pengarahannya yang jelas pada DISKOMINFO Kabupaten Bandung ketika terjadi bencana dari perancangan DRP yang telah dibuat.

I.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini yang perlu diperhatikan adalah:

1. Untuk solusi teknologi pada Penelitian ini hanya rekomendasi dan tidak bersifat teknis.
2. Pada proses pembangunan DRP ini hanya sampai pembuatan prosedur metode pengujian DRP yaitu *checklist test*.
3. Lingkup pembahasan Penelitian ini hanya mengenai DRP TI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang layanannya dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung.
4. Penelitian ini mengambil hasil dari *Risk Assessment* dan *Business Impact Analysis* di penelitian sebelumnya.
5. Standar yang digunakan dalam Penelitian ini adalah ISO 22301.
6. Klausul yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah semua klausul terkecuali klausul 9 dan 10.
7. Rekomendasi kebijakan berfokus pada kebijakan DRP.
8. Tidak membahas finansial Diskominfo.